KAJIAN PUSTAKA

1. POLITIK

Secara etimologis kata politik berasal dari kata polis (kota: Bahasa Yunani) intinya ialah bagaimana mengatur hidup bersama. Secara umum, politik adalah suatu proses dimana masyarakat secara bersama menentukan siapa yang akan mengatur kehidupan mereka secara bersama. Politik adalah upaya yang dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu mengatur kehidupan bersama demi mencapai kebaikan/kesej ah teraan bersama.[[1]](#footnote-1)

Istilah politik menurut Harold D. Lasswell lebih menegaskan bahwa

politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Menurut Eric Louw politik

mengandung sejumlah konsep kenegaraan, yakni kekuasaan, pengambilan

keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi sumber daya. Menurut

Budiardjo (2002) politik adalah adanya suatu proses yang dilakukan untuk

mencapai suatu tujuan yang ingin didapatkan sekaligus cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya. Agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat

tercapai sesuai dengan yang diinginkan maka dibutuhkan adanya kebijakan

yang dapat mengatur sumberdaya yang dimiliki. Setelah adanya kebijakan

maka perlu adanya kekuatan (power) dan kewenangan (authority) agar

kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya sekedar

pencapaian tujuan lebih dari itu Budiarjo mengemukakan bahwa tujuan politik

sejatinya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak / masyarakat jadi bukan kepeningan pribadi yang diutamakan.[[2]](#footnote-2)

Menurut Miriam Boedihardjo politik sebagai proses mencapai tujuan. Ia menguraikan tiga konsep politik: politik berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making)f kebijaksanaan umum (public policy), pembagian (distribution)f dan alokasi (allocation). Menurut Kari Deutch mendefinisikan politik sebagai proses pengambilan keputusan politics is the making of decision by public means, yang dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat.[[3]](#footnote-3) Menurut Gabriel A. Almond politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kendali dalam membuat keputusan publik dalam masyarakat tertentu dan wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrument yang sifatnya otoritatif dan kohersif.

Berdasarkan pandangan para ahli tentang defenisi politik maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu sistem yang ada dipemerintahan untuk mengatur ketatanegaraan agar dapat mencapai tujuan bersama dan untuk kesejahteraan bersama, juga usaha untuk mengambil keputusan secara tepat dan adil demi untuk kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan bersama. Politik juga tidak terlepas dari interaksi dalam suatu masyarakat untuk dapat menyepakati siapa yang layak untuk diberi kewenangan berkuasa untuk membuat keputusan publik.

1. Demokrasi

Pemakaian kata demokrasi bagi negara berkembang seperti Indonesia bukan menjadi hal yang jarang untuk didengar namun sudah sangat melekat di telinga warga negaranya, pada umumnya kata demokrasi diambil dari Bahasa Yunani yang berasal dari dua suku kata demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan berada di tangan rakyat. Lebih dari itu bahwa rakyar yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang akan dijalani, dan memiliki arti yang lebih luas dilihat dari perspektif pemakainya.

Di Athena Yunani, 5 abad SM termonologi demokrasi digunakan untuk menunjukkan adanya pemerintahan yang diatur menurut kepentingan banyak orang bukan karena kepentingan pribadi individu (oligarchy dan monarchy). Dalam pandangan Barat, demokrasi adalah suatu sistem politik yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislative dan yudikatif dan juga adanya ketentuan pemilihan yang jujur dan adil (free and fair), dan lebih dalam maknanya bahwa demokrasi adalah sisitem politik yang melindungi kemerdekaan berbicara, berumpul, beragama dan berperilaku dalam masyarakat yang semua itu dikemas dalam hukum (Huntington, 2004). Menurut Young demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Dalam pelaksanaannya demokrasi politik harus beijalan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku, memajukan individu dan untuk adanya pelaksanaan pemilihan secara umum dan bebas.[[4]](#footnote-4)

Menurut Abraham Linclon melalui pidatonya pada tahun 1863, yakni: government of people, by people, for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan pandangan para ahli tentang demokrasi diatas maka disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang melibatkan rakyatnya secara langsung atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan, untuk masa depan yang lebih adil dan sejahterah. Rakyat berperan penting dalam system politik demokrasi karena rakyat yang terlibat sebagai penentu, pembuat suatu kebijakan yang akan dijalankan karena adanya kebijakan yang dibuat tersebut nantinya akan dijalankan oleh rakayat.

Pengaruh utama dalam demokrasi adalah rakyat, kaena rakyat dijadikan sebagai gerbang utama suatu kebijakan dapat dijalankan sehingga adanya pendapat yang bersifat absolute dapat dipatahkan. Dalam sistem demokrasi adanya istilah keputusan tidak dapat diganggu gugat itu tidak berlaku karena system demokrasi mengutamakan musyawarah untuk menentukan suatu keputusan sehingga muncul ide-ide yang diperoleh dari adanya diskusi dan debat-debat yang berlangsung dalam suatu forum yang disebut musyawarah.

1. Sistem Politik Di Indonesia

Masyarakat adalah penentu dalam sistem politik, sebab masyarakat atau rakyat dianggap sebagai objek dan subjek dari sistem politik yang ada.

Menurut Nico Schulte Nordholt (Dalam Juliansyah), Adanya dukungan yang tinggi yang diberikan dalam sistem politik mencakup peran serta keterlibatan secara aktif menjadi kekuatan dalam pelaksanaan system politik tersebut. Linz dan Stepan mengemukakan lima syarat dalam proses transisi menuju sistem demokrasi. Pertama, civil society yang bebas dan aktif. Kedua, masyarakat poltik termasuk elit parpol-parpol yang ralatif otonom. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, masyarakat yang ekonomi relatif otonom dari Negara dan pasar mumi.

Seluruh kalangan masyarakat baik masyarakat biasa maupun masyaraat sipil diberikan kewenangan untuk secara bebas untuk berperan aktif menentukan arah keberlangsungan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Peran masyarakat tercermin dari berbagai aspek tidak hanya dalam rangka memajukan kepentingan umum melalui tindakan-tindakan politik saja seperti mengikuti pemilihan secara bebas, jujur dan bertanggungjawab namun juga peran untuk menemukan nasib sendiri juga salah satu aspek yang harus dilakukan. Oleh kerana itu pemerintah sebagai katalisator berperan dalam pertumbuhan masyarakat yang lebih baik melalui kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Demokrasi dapat berjalan dengan biak apabila adanya keijasama seluruh elemen masyarakat dan juga elit politik untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat dalam system politik dengan sebaik mungkin.[[6]](#footnote-6)

Sistem Politik di Indonesia adalah berbagai kegiatan secara keseluruhan yang ada di dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti upaya untuk mewujudkan tujuan bersama untuk bangsa dan Negara yang lebih baik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan dan keputusan demi untuk kebaikan bersama masyarakat dan yang akan mengikat secara bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Supra politik di Indonesia yaitu:

1. Lembaga Eksekutif (Pelaksana UU)
2. Lembaga Legislatif (Pembuat UU)
3. Lembaga Yudikatif (Mengadili pelanggaran UU) MP R, Presiden, DPR,

BPK, MA, MK, KY, DPD Infrastruktur Poltik yaitu:

1. Partai Politik
2. Kelompok Kepentingan
3. Kelompok Penekan
4. Model Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pemilihan yang paling terkecil di dalam sebuah tatanan kepemerintahan dan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat atau warga desa. Pemilihan kepala desa juga merupakan suatu kegiatan pesta demokrasi yang merakyat. Ketika pesta demokrasi ini dilakukan dengan benar dan dimanfaatkan dengan baik maka ajang politik ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran politik bagi kita sendiri.

Pemerintah desa merupakan alat pemerintah Republik Indonesia dengan satuan organisasi terendah yang ditempatkan di bawah pertanggungjawaban langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Adanya keterwakilan rakyat dalam system pemerintahan yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan serta peran serta yang dapat terhubung dengan kebijakan pemerintah menjadi salah satu unsur penentu suatu pemerintahan dikatkatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Balikan dalam susunan pemerintahan yang paling bawah seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berperan sebagai sarana penyambung atau disebut dengan badan legislasi.[[7]](#footnote-7)

Pemilihan Umum adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk wakil-wakil rakyat yang akan menduduki Lembaga politik negara legislative dan eksekutif. Salah satu bentuk dari pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diatur dalam pasal 46 ayat 1,2 dan 3 yakni:

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pemilihan yang dalakukan secara langsung artinya bahwa, rakyat sebagai pemilih diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memilih sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain. Pemilihan secara umum artinya bahwa, tidak adanya diskriminasi yang hanya membolehkan golongan tertentu yang mengikuti pemilihan namun semua golongan baik berbeda agama, suku, ras dan golongan boleh mengikuti dan memiliki hak untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut. Warga Negara juga bebas dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan juga paksaan dari siapapun. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dijamin keamanannya sesuai dengan hokum dan aturan yang berlaku untuk mengikuti pemilihan yang sedang berlangsung serta adanya pelaksanaan pemilihan secara jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [[8]](#footnote-8)

10

1. Demokrasi Dalam Alkitab

Demokrasi dalam Alkitab tidak ada tertulis secara langsung. Tetapi dalam Alkitab telah tersirat bagian-bagian yang mengungkapkan hubungan negara dan umat Allah/ gereja, a. Pandangan Perjanjian Lama

Dalam 1 Raja2 12, membahas tentang kepemimpinan Raja Rehabeam. Rehabeam menggantikan Ayahnya dalam memimpin Israel, Rehabeam meminta nasehat dari para tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidupnya. Para tua-tua itu menjawab:

“Jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.”

Kepemimpinan yang baik adalah suatu syarat mutlak bagi pertumbuhan,

kestabilan, dan juga kemajuan suatu kelompok. Tanpa kepemimpinan yang

baik maka kelompok tidak akan menjadi baik. Seorang pemimpin yang

baik haruslah dapat mendengarkan suara rakyatnya dengan mengutamakan

kepentingan bersama, dan menjadi pelayan bagi rakyatnya sebab pemimpin

tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani. Tetapi yang terjadi pada

masa kepemimpinan raja Rehabeam adalah Rehabeam gagal dalam

kepemimpinannya karena ia tidak mendengarkan nasihat para tua-tua yang

telah memiliki pengalaman. Rehabeam tidak mendengarkan suara

rakyatnya, dan tidak melayani rakyatnya dengan baik. Akibatnya terjadilah

perpecahan Raja-raja ada yang melakukan kehendak Tuhan ada juga yang

melakukan kejahatan dimata Tuhan.

Sekalipun Rehabeam gagal dalam kepemimpinanya, karena kesombongan dan tidak melakukan apa yang baik dimata Tuhan sebab ia tidak mendengar suara rakyatnya. Namun yang terpenting adalah dalam menjalankan sistem kepemimpinan seorang pemimpin harus menjadi pelayan bagi rakyatnya bukan untuk dilayani, dan mendengarkan suara rakyatnya untuk kepentingan bersama. Dari kegagalan Rehabeam dalam menjalankan sistem kepemimpinan yang demokratis ada nilai-nilai demokratis yang dapat dipelajari yaitu kepemimpinan yang demokratis harus bisa menjadi pelayan bagi yang dipimpin, dan mendengarkan suara rakyat dengan mengutamakan kepentingan bersama.[[9]](#footnote-9)

Demokrasi dapat juga kita lihat dalam (Mazmur 146:5-9 “Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allanya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkuning, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang yang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkanya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya”). Ayat ini menekankan jika Tuhan adalah siunber satu-satunya penolong bagi orang-orang yang lemah dan juga tertindas. Allah merupakan sosok yang adil bagi setiap orang yang tertindas dan lemah. Dalam demokrasi secara nyata digambarkan bahwa semua manusia punya hak yang sama dalam menentukan hidupnya sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Nya. Demokrasi ada dalam peradaban manusia sebagai bukti nyata bahwa manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang diberi kebebasan dalam berpendapat dan mengutarakan apa yang dipikirkan lalu disalurkan dan didengarkan oleh orang lain. Manusia juga berhak unta k menentukan pilihan dalam hidupnya terlebih memilih pemimpin yang baik untuk suatu bangsa.

“Berkatalah aku kepada mereka: kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maka, kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela.” (Nehemia 2:17)

Dari sini kita dapat melihat bahwa manusia harus dan berkewajiban untuk bersatu dalam membangun atau melakukan sesuatu. Demokrasi harus dilakukan oleh semua rakyat dengan seksama. Rakyat yang dapat bersatu akan menghasilkan suatu kesepakatan dan selanjutnya diwujudkan secara bersama-sama. Berdirinya suatu bangsa atau Negara bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak tetapi dilakukan secara bersama-sama dan dengan kekompakan.

Dalam Kejadian 11 dapat dilihat mengenai kelahiran bangsa- bangsa, lalu dalam Kejadian 12 kita juga dapat melihat tentang pemilihan Abraham. Dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah akan membentuk suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Allah sendiri. Tetapi kemudian Israel tidak disebutkan sebagai suahi bangsa melainkan “Umat” hal ini menekankan kesamaan kedudukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kedudukan manusia semua sama karena semuanya diikat oleh kesamaan dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, para ahli Peijanjian Lama menyimpulkan bahwa “Umat5’ merupakan sebuah masyarakat teokratis yang demokratis. Dalam uraian tentang bangsa Israel, kita dapat mengetahui bahwa pada mulanya pemerintahan yang dipimpin oleh Allah merupakan pemerintahan dengan gaya teokratis yang demokrasi. Sehinggah kita dapat melihat bahwa dalam sistem pemerintahan tersebut semua kedudukan manusia sama tidak ada yang saling menguasai. Ini merupakan suatu kunci demokrasi dan ini juga menjadi prinsip kristiani.[[10]](#footnote-10)

Dalam Iman Kristen demokrasi memiliki makna ketika ‘"Kasih” dan “Keadilan” yang menjadi motivasi dan juga tujuan seseorang. Seseorang juga memiliki martabat sebagai seorang pekeija (Pelayan), agar kehidupan bersama dapat menjadi nyata, kasih dapat dinyatakan ketika orang-orang memberikan dirinya untuk pelayanan dalam masyarakat. Oleh karena itu orang Kristen wajib untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, ini dapat diwujudkan melalui turut berpartisipasi aktif dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, dan juga aktif dalam pengambilan keputusan yang dapat mengatur kehidupan secara bersama. Sebagai orang Kristen kita menyadari bahwa semua kuasa hanya berasal dari Allah saja, oleh karena itu kuasa yang diberikan Allah kepada manusia harus dapat dipertanggungjawabkan dengan saling melayani dengan sesama. Orang- orang Kristen yang terlibat dalam kegiatan politik haruslah menyuarakan suara kenabian yang didasarkan pada nilai-nilai yang universal yaitu: mempeijuangkan kesetaraan, menegakkan keadilan, menghormati kebebasan dengan bertanggungjawab, dan mempraktikkan kasih kepada semua orang.

b. Pandangan Perjanjian Baru

Dalam Peijanjian Baru dapat juga kita lihat pemilihan-pemilihan yang dilakukan secara demokrasi. Dalam Kisah Para Rasul 1:15-26 Matias terpilih untuk menggantikan posisi Yudas sebagai murid Yesus. Sebelum Matias terpilih ada proses yang dilalui dimana ada 120 kandidat yang hadir di suatu tempat di Yerusalem pada saat itu mereka mengusulkan dua nama setelah mereka mengusulkan, mereka berdoa setelah itu mereka membuang undi dan Matias terpilih pada saat itu. Meskipun cara yang dilakukan pada saat itu dengan cara membuang undi melalui urim dan tumim untuk bisa mendapatkan suatu keputusan tetapi hal itu dilakukan untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan bukan untuk mengetahui aspirasi mayoritas. Tetapi musyawarah mufakat diterapkan sebagai suatu cara untuk perundingan dalam mengatasi suatu masalah. Ini merupakan bentuk

kebebsan yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan dalam kebebsan

manusia. Orang Kristen mengakui dan meyakini dalam memilih pemimpin bukan kita yang memilih tetapi Tuhanlah yang memilih, oleh karena itu berdoa merupakan hal yang penting dalam memilih bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen penting untuk berdoa dan mendoakan.

Dalam “Kisah Para Rasul 6:1-6” kita juga dapat melihat dengan pemilihan ketujuh orang diaken untuk melaksanakan pelayanan, jemaat lalu menyalurkan aspirasinya dengan memilih sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan para Rasul. Setelah ketujuh orang tersebut terpilih, para Rasul lalu menumpangkan tangan atas mereka sebagai suatu tanda bahwa mereka dilantik dan akan memulai pekerjaan mereka.

Dari peristiwa tersebut kita dapat melihat bahwa ide demokrasi mulai muncul, dimana gereja pada saat itu mulai mengadopsi sistem demokrasi. Jemaat pada saat itu diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan pilihan mereka dan tetap menempatkan Roh Kudus sebagai penentu utama dalam kebenaran memilih. Perjanjian Baru juga memberikan suatu petunjuk tentang diadakannya permusyawaratan untuk dapat mencapai kata mufakat. Kisah Para Rasul 15:1-29 yang mengisahkan bagaimana Para Rasul dapat mengambil suatu keputusan untuk dapat mengatasi suatu

persoalan yang muncul diantara orang-orang Kristan Yahudi dengan

orang-orang Kristen non Yahudi. Para Rasul tersebut saling memberikan

pendapat dalam suatu persidangan sehingga pada akhirnya mereka

menumukan kata sepakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu

perkara yang tidak bersifat mutlak, maka untuk bisa menukan kata sepakat

orang-orang melakukan dengan cara musyawarah.[[11]](#footnote-11)

1. Cara Menyikapai Perbedaan Pilihan

Perbedaan pilihan dalam memilih seorang pemimpin adalah suatu hal yang

mutlak. Sebab orang berhak untuk menentukan pilihannya siapa yang dianggap

baik untuk dapat menjadi memimpin. Perbedaan pendapat bahkan perbedaan

pilihan dalam sebuah pesta demokrasi merupakan suatu hal yang biasa. Oleh

karena itu, dalam menyikapai perbedaan pilihan adalah bentuk kedewasaan,

saling menghormati, dan sadar bahwa sebagai manusia kita diberi hak dan

kebebasan dalam menentukan pilihan kita. Sebagai orang Kristen dalam

mnyikapi perbedaan politik, maka orang Kristen diajak kembaU untuk dapat

memahami politik secara benar, agar tidak jatuh pada politik praktis dan juga

tidak mudah dalam menyebarkan berita hoax, menghindari ujaran kebencian

terhadap orang-orang yang berlawanan politik dan yang berbeda pilihan, saling

menghargai perbedaan pilihan, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki

hak dan kebebasan dalam menentukan pilihannya. Dalam proses politik maka, yang harus dinampakkan adalah kemuliaan Allah dengan mewujudkan kesejahteraan bersama. Orang Kristen harus dapat memahami bahwa politik adalah suatu wadah yang telah Allah sediakan oleh karena itu, harus mengutamakan kepentingan bersama yang dilandasi dengan keadilan dan kasih terhadap sesama. Ketika terjadi perbedaan pandangan dalam politik maka, kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki falsafah hidup yang berbeda- beda maka, kita harus saling menghargai.[[12]](#footnote-12)

1. Pandangan Gereja Tentang Politik Praktis

Gereja menjadi salah satu tempat yang berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan yang berlangsung. Gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah atau tempat menjalankan ritual keagamaan namun gereja bias dijadikan sebagai sarana dalam menjalanakn kasih dan saying Allah terhadap umatnya. Oleh karena itu melakukan peran lebih dalam pelaksanaan transformasi manusia dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Gereja melakukan fimgsi politik tetapi bukan politik kekuasan, melainkan politik moral dalam membina

Indonesia menjadi rumah kediaman secara bersama masyarakat Indonesia yang majemuk.[[13]](#footnote-13)

Yang menjadikan politik menjadi keruh karena adanya cara berpolitik yang tidak berkarakter baik dan juga tidak dewasa. Oleh karena itu hal ini membuat perpecahan dan membangun kubu-kubu yang sudah tidak peduli dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Fakta yang begitu sulit untuk dipungkiri adalah pengaruh politik secara prsktis telah menembusi semua lapisan kehidupan, balikan telah menguasai kehidupan manusia saat ini. dalam pemilihan calon legislatife (CALEG) mulai dari Pemilihan Presiden, DPR, DPD, GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa, yang memberikan dampak yang sangat kuat bagi roda kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Persaingan dalam dunia politik dari zaman ke zaman terus terjadi disemua kalangan, yang pada ujungnya menimbulkan pengelompokan di masyarakat sehinga saling adu berbagai macam kekuatan. Persaingan dunia politik juga cenderung berkhir pada sistem hukum rimba (yang kuat dan yang besarlah yang menang), tanpa disadari bahwa gereja juga kadang iktu terseret di dalamnya, dan tidak jarang ada yang ikut gaya politik abu-abu dengan kata lain bahwa tidak menampakkan sebuah karakter yang berdiri di atas kebenaran Firman Tuhan. Gaya berpolitik juga cenderung digunakan dengan cara menyentuh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia saat ini. melalui gaya-gaya politik yang teijadi saat ini, maka tidak heran jika orang-orang mulai memiliki pemahaman bahwa politik adalah hal yang kotor. Pada dasarnya politik adalah upaya untuk membuat sebuah rancangan kehidupan yang lebih baik. Tetapi upaya ini menjadi tercemar balikan kotor karena adanya kekuasaan, keegoisan, dan juga politik uang. Gereja terlibat dalam politik karena gereja berada pada lingkungan yang berpolitik. Tetapi gereja harus berorientasi pada pada hasil bukan tujuan. Ketika Yesus bertanya jawab dengan dengan para tokoh agama tentang persoalan bangsa Yahudi yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, yesus menunjukkan sebuah realita kehidupan yang teijadi dalam komunitas kehidupan saat itu karena Ia melihat banyak orang membutuhkan kebebasan dari tekanan politik kehidupan. Yesus datang membawa perubahan dalam kehidupan manusia yang dimana karakter manusia yang dulu harus diubahkan. Yesus benar-benar hadir dengan menunjukkan diri-Nya sebagai pemimpin yang memiliki integritas di hadapan publik. Perubahan yang ditegaskan oleh Yesus, haruslah dimulai dari dalam kehidupan orang-orang yang berada pada tekanan, karena itu Yesus memberikan pemahaman secara

benar melalui pendekatan-pendekatan yang berpatokan pada kebenaran. Apa

yang dikatakan itu juga yang harus dilakukan ini menunjukkan sebuah

integritas yang dilakukan oleh Yesus dalam melaksanakan perjalan misi-Nya.

Gereja hams bisa menjadi seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan kehidupan khusunya dalam lingkup perpolitikan. Gereja hams bisa tampil dengan memberi warna melalui integritas yang dimiliki dengan berdasar pada Firman Tuhan. Dengan demikian gereja mampu melihat dan menyentuh kehidupan setiap manusia dengan memperlihatkan konsistensi dan komitmen gereja dalam mewarnai kehidupan bangsa. Gereja (orang Kristen) harus bisa hadir sebagai terang dan garam di manapun ia berada (Matius 5:13-16). Yang artinya bahwa dimanapun kita berada di manapun tempatnya kita berkesempatan untuk melayani. Oleh karena itu Kristus sangat menghendaki orang-orang percaya untuk menjadi saksi dimanapun ia berada termasuk dalam dunia politik.

Dalam (Markus 10: 42-43), Tuhan berkata:

“Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa- bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar- pembesamya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak kali demikian diantara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu”.

Dalam Firman Tuhan Ini, Krishis memberi sebuah teladan tentang kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang menindas,

diskriminatif, atau memperbudak. Yesus pantas untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. [[14]](#footnote-14) [[15]](#footnote-15)

Tetapi kenyataannya, orang Kristen sulit untuk memberikan diri dalam dunia politik. Tanpa mereka sadari bahwa untuk dapat berperan di Indonesia, maka salah satu pintu adalah dunia politik sebab dunia politik merupakan tempat untuk perumusan segala sistem atau tata perumusan pemerintahan di Indonesia untuk kemajuan yang lebih baik. Gereja diutus Tuhan dan ditempatkan di dunia untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun berada bahkan juga dalam dunia politik. Ketika gereja mampu untuk menjadi terang maka pemerintah, dan para politisi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sadar bahwa kehadirannya sebagai pelayan bukan untuk dilayani. [[16]](#footnote-16)

1. Petrus Tiranda, fciPeran Umat Kristen Dalam Politik'' Dalam **Kepemimpinan Kristen Berwawasan Nusantara**, ed Haris Evan Siahaan (Surakarta: CV Sejati Mitra Mandiri, 2019). 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hafied Cangara, **Komunikasi Politik** (.(PT RajaGrafmdo Persada,Jakarta. 2016).23-24 [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Paillin Rumbi, “Partisipasi Pemimpin Umat Kristiani dalam Politik Kebangsaan di Indonesia’' Dalam **Kepemimpinan Kristen Berwawasan Nusantara** ed Haris Evan Siahaan(Surakarta: CV Sejati Mitra Mandiri, 2019), 25-26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hafied Cangara, **Komunikasi Politik** (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016). 53-54 [↑](#footnote-ref-4)
5. Saut Sirait, **Politik Kristen Di Indonesia** (PT BKP Gunung Mulia, Jakarta. 2006). 29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Endang Komara, **Sistem Politik di Indonesia Pasca Reformasi.(d**alam Journal SOSIO DIDAKTIKA). [↑](#footnote-ref-6)
7. **Hery Kurniawan,** Politik Loka! di Tingkat Desa. [↑](#footnote-ref-7)
8. ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Alkitab, Terjemahan Baru [↑](#footnote-ref-9)
10. Astrid Nirmalasari Sutikno, dkk. **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Knsten,** https ://www. academia, edu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yushak Soesilo, Demokrasi Dalam Pandangan Kristen (Dalam Journal STT Intheos, Surakarta) [↑](#footnote-ref-11)
12. Yohanes Krismantyo Susanta, **Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan AdoniaDalam Persaingan Menuju Tahta,** (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.4, No. 1, Oktober 2019). [↑](#footnote-ref-12)
13. **Zakaria J. Ngelow,** Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama **-** Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia, **(JURNAL JAFFRAY, Vol 12,No 2, Oktober 2014).** [↑](#footnote-ref-13)
14. Parei T. J.,Maidiantius T. J., Politik Yesus Bagi Indonesia, (PT. Malana Bina Utama; Tangerang-Indonesia 2014). ii-03 [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Erman S. Saragih, Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis. [↑](#footnote-ref-16)